

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN
PRINSIP *VALUE FOR MONEY*
(STUDY KASUS KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2010-2013)**

Nindy Cahya Feriska Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Email : nindy.cahya93@yahoo.com

Abstract

System in the development of public sector budgets have become multifunctional instruments that are used as a tool to achieve organizational goals. Budget is a plans of work that local government finances will be used as a basis for development in the region. In conducting the preparation, discussion, determination to supervise the implementation of the budget is not enough to just look at the size of the budget but also must the output produced by economically, efficiently and effectively for the betterment of the region. In this study, the authors want to analyze the performance of Sumenep government by using the principle of value for money which is based on three ratios is economical ratio, the efficiency ratio and effectiveness ratios. The results showed that the performance of Sumenep governments period 2010-2013 as a whole is good

Keyword : Value for money, economic, efficient, and effective

Abstrak

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. APBD merupakan suatu rencana kerja keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan pada daerahnya. Dalam melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran tapi juga harus output yang dihasilkan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk kemajuan daerah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip *value for money* yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik

Kata kunci : Value for money, ekonomis, efisiensi, efektifitas

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Anonim, 2004). Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik.

Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutandan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah melalui sitem akuntansi pemerintah daerah. SAP menegaskan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan (Manik, 2013).

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instusi yang selalu merugi. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4). Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan

pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Mulyadi, 2007).

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Jawa Timur. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar. Tahun anggaran 2011 dan 2012, prioritas APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan tahun 2013 diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah anggarannya telah melebihi satu triliun rupiah dan kenaikannya cukup signifikan.

Pendapatan daerah Kabupaten Sumenep semakin mengalami kenaikan sehingga dapat memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membiayai dan mengurus daerahnya. Pada tahun 2011 pendapatan daerah naik 8,83%, tahun 2012 naik sebesar 16,23 persen dan pada tahun 2013 naik sebesar 10,63 %. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan indikasi keberhasilan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Potensi pendapatan daerah telah dimanfaatkan secara maksimal, sedangkan pemungutan dapat diminimalisasi kebocoran anggarannya. Laju kenaikan pendapatan APBD kabupaten Sumenep memang berbanding lurus dengan kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah.

Manajemen PAD Sumenep melakukan perbaikan pada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jumlah anggaran pendapatan yang semakin besar

memudahkan penyediaan anggaran belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pada tahun 2013, kebutuhan belanja daerah sebesar Rp. 1.518.729.593.450 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.002.986.577.381 dan belanja langsungnya sebesar Rp. 515.743.016.069. Dengan begitu pelaksanaan APBD harus lebih memperhatikan disiplin anggaran, baik pada saat akan memulai pelaksanaannya maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Disiplin anggaran tersebut merupakan salah satu cara untuk menghindari booming pencairan anggaran dan penyelesaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan APBD harus direncanakan sebaik-baiknya sesuai dengan anggaran kas dan time schedule pelaksanaannya agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Dengan melihat fakta yang ada dan latar belakang tersebut maka penulis melakukan suatu penelitian tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money*. Studi ini bermaksud menyederhanakan penilaian kinerja sektor publik pada Kabupaten Sumenep dengan menggunakan konsep *Value for Money* yang difokuskan pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja pada Pemerintah Daerah

Sesuai dengan anjuran Pemerintah dalam UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 memberi arti penting bagi proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut memberi dasar bagi serangkaian reformasi

kelembagaan dalam rangka menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Menurut Nugrahani (2007) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri dituangkan dalam bentuk APBD yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan kewenangan dalam mengelola keuangannya.

Menurut Ulum dan Murtin, (2004), dalam Pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan satuan kerja perangkat daerah perlu membuat Laporan Realisasi Anggaran guna menilai prestasi kinerja. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 yang berisi perlunya prestasi kinerja kepala daerah, yaitu dengan meminta pertanggung jawaban kepala daerah di setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Norma Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas, dan Neraca Daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang. Anggaran juga dipahami sebagai pernyataan yang berisi perincian penerimaan dan belanja operasional maupun belanja modal, bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang (Tony Byrne dalam Rinusu, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu pertama, sebagai alat perencanaan; kedua, sebagai alat pengendalian, ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal, keempat, sebagai alat politik, kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, keenam, sebagai alat penilaian kinerja, ketujuh, sebagai alat motivasi, dan kedelapan, sebagai alat menciptakan ruang publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulah yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan transfer. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (1) anggaran pendapatan, (2) anggaran belanja, (3) transfer, dan (4) pembiayaan.

Value For Money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

1. Ekonomis, adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi, adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektifitas, adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *value for money* dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan, ekonomi merupakan ukuran relatif. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok elemen *value for money*. Pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua:

1. Efisiensi alokasi

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal

2. Efisiensi teknis atau manajerial

Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu (Mardiasmo, 2002:133).

Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah ekonomi: hemat / cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya; efisiensi: berdaya guna dalam penggunaan sumber daya; efektifitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran; equity: keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik dan equality: kesetaraan dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan lain dari *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik, karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pengukuran Kinerja berdasarkan Konsep *Value For Money*

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus

mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (*intangible output*). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

1. Ukuran kinerja, umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
2. Indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.
- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan profesional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.
- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian *reward* dan *punishment* yang bersifat finansial sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya.

Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi (Mardiasmo, 2009).

Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

Menurut Mardiasmo(2009: 133) langkah-langkah pengukuran value for money adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang digunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama,
- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Rumus rasio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasio efektivitas dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

METODE PENELITIAN

Objek dan Jenis Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Objek penelitian adalah kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep selama periode tahun 2010-2013. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif merupakan gambaran atau lukisan secara faktual mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Dengan fokus penelitian tentang analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *Value For Money* pada Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013.

Sumber dan Jenis Data

Data adalah suatu kenyataan yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep dan website Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan menyeluruh tentang mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan prinsip *value for money*.

2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi (Hasan, 2002 : 87). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010-2013.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Rachman, 1992:120).

Menurut Miles dan Huberman terdapat empat tahap analisis data yaitu :

- a. Pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep dan website Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data.
- d. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada periode tahun 2010 sampai tahun 2013 untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money yaitu dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Rincian data APBD dan RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010

NO	URAIAN	TAHUN 2010	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan	953.928.315.356	953.403.305.810
1.1	Pendapatan Asli Daerah	38.797.114.248	46.702.756.752
1.2	Dana Berimbang	774.014.628.091	787.554.530.823
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	141.116.573.017	119.146.018.235
2.	Belanja Daerah	1.074.913.22.403	948.049.327.983
2.1	Belanja Tidak Langsung	782.519.705.133	736.733.325.567
2.2	Belanja Langsung	292.393.507.270	211.316.002.416
	Surplus / (Defisit)	(120.984.897.047)	5.353.977.827
3.	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	188.543.970.561	175.379.995.127
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67.559.073.514	9.561.387.214
	Pembiayaan Netto	120.984.987.047	165.818.607.913
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	171.172.585.740

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, 2010, diolah

**Tabel 2. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan RAPBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2011**

NO	URAIAN	TAHUN 2011	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan	1.138.1733.477.018	1.147.757.600.881
1.1	Pendapatan Asli Daerah	52.934.248.645	57.940.353.705
1.2	Dana Berimbang	890.929.575.235	895.862.161.748
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	194.309.653.138	193.955.085.428
2.	Belanja Daerah	1.231.525.862.521	1.108.144.268.085
2.1	Belanja Tidak Langsung	842.086.786.667	800.881.865.405
2.2	Belanja Langsung	389.439.075.854	307.262.402.680
	Surplus / (Defisit)	(93.352.385.503)	39.613.332.797
3.	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	171.172.585.740	172.018.018.683
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	77.820.200.237	29.000.000.000
	Pembiayaan Netto	93.352.385.503	143.018.018.683
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	182.631.351.480

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, 2011, diolah

**Tabel 3. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan RAPBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2012**

NO	URAIAN	TAHUN 2012	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan	1.322.918.986.510	1.338.898.292.216
1.1	Pendapatan Asli Daerah	73.543.192.483	85.886.851.769
1.2	Dana Berimbang	1.051.672.826.675	1.057.063.649.154
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	197.702.967.352	195.947.791.293
2.	Belanja Daerah	1.422.283.673.196	1.276.780.256.594
2.1	Belanja Tidak Langsung	910.187.537.631	855.506.178.970
2.2	Belanja Langsung	512.096.135.565	421.274.077.624
	Surplus / (Defisit)	(99.364.686.686)	62.118.035.622
3.	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	182.631.351.479	183.031.194.825
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	83.266.664.793	24.500.000.000
	Pembiayaan Netto	99.364.686.686	158.531.194.825
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	220.649.230.447

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, 2012, diolah

1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melaksanakan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka rasio ekonomis Kabupaten Sumenep tahun 2010 – 2013 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio ekonomis 2010} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 948.049.327.983}}{\text{Rp. 1.074.913.212.403}} \times 100\% = 88,2\% \\ \text{Rasio ekonomis 2011} &= \frac{\text{Rp. 1.108.144.268.085}}{\text{Rp. 1.231.525.862.521}} \times 100\% = 89,98\% \\ \text{Rasio ekonomis 2012} &= \frac{\text{Rp. 1.276.780.256.594}}{\text{Rp. 1.422.283.673.196}} \times 100\% = 89,77\% \\ \text{Rasio ekonomis 2013} &= \frac{\text{Rp. 1.377.226.176.846}}{\text{Rp. 1.518.729.593.450}} \times 100\% = 90,68\% \end{aligned}$$

Tabel 4. Rasio Ekonomis Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013

Tahun	Persen (%)
2010	88,2 %
2011	89,98 %
2012	89,77 %
2013	90,68 %

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, 2010-2013, diolah

Dari tabel di atas, perkembangan rasio ekonomis Kabupaten Sumenep dari tahun 2008-2013 cukup konsisten berada pada katagori ekonomis, walaupun

terjadi fluktuasi persentase pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan 1.72 %, dari 88, 2 % menjadi 89,98 %. Tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 89,77 % dan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 0.91 menjadi 90,68 %. Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep menggunakan sistem disiplin anggaran pada saat akan memulai pelaksanaan program pemerintahan maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Disiplin anggaran salah satu cara untuk menghindari booming pencairan anggaran dan dapat menekan pengeluaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara ekonomis.

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

$$\text{Rasio Efisiensi 2010} = \frac{\text{Rp. 948.049.327.983}}{\text{Rp. 953.403.305.810}} \times 100\% = 99,44 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2011} &= \frac{\text{Rp. 1.108.144.268.084}}{\text{Rp. 1.147.757.600.881}} \times 100\% = 96,55 \% \\ \text{Rasio Efisiensi 2012} &= \frac{\text{Rp. 1.276.780.256.594}}{\text{Rp. 1.338.898.292.216}} \times 100\% = 95,36 \% \\ \text{Rasio Efisiensi 2013} &= \frac{\text{Rp. 1.377.226.176.846}}{\text{Rp. 1.482.344.212.468}} \times 100\% = 92,91 \% \end{aligned}$$

Tabel 5. Rasio Efisiensi Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013

Tahun	Persenan (%)
2010	99,44 %
2011	96,55 %
2012	95,36 %
2013	92,91 %

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, 2010-2013, diolah

Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode tahun 2010 hingga tahun 2013 semakin mengalami peningkatan. Tahun 2010 rasio efisiensi kabupaten Sumenep menunjukkan 99,44 %, tahun 2011 menunjukkan 96,55 %, tahun 2012 menunjukkan 95,36 % dan pada tahun 2013 adalah 92,91 %. Kinerja pemerintah menurut perhitungan rasio efisiensi berada pada katagori efisien. Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan SDM untuk mengelolah sumber daya alam yang terdapat diwilayah Kota Sumenep dan kepulauan seperti yang telah tercantum pada misi Kabupaten Sumenep. Pada wilayah kepulauan, pemerintah daerah melakukan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang digunakan untuk mengelolah sumber daya alam (MIGAS). Pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Minyak dan Gas dan

melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan MIGAS untuk mengoptimalkan pendapatan dan untuk meningkatkan efisiensi

3. Rasio Efektifitas

Efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

$$\text{Rasio Efektifitas 2010} = \frac{\text{Rp. 953.403.305.810}}{\text{Rp. 953.928.315.356}} \times 100\% = 99,95 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas 2011} = \frac{\text{Rp. 1.147.757.600.881}}{\text{Rp. 1.138.173.477.018}} \times 100\% = 100,84 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas 2012} = \frac{\text{Rp. 1.338.898.292.216}}{\text{Rp. 1.322.918.986.510}} \times 100\% = 101,21 \%$$

$$\text{Rasio efektifitas 2013} = \frac{\text{Rp. 1.482.344.212.468}}{\text{Rp. 1.463.571.560.414}} \times 100\% = 101,28 \%$$

**Tabel 3. Rasio Efektifitas Kabupaten Sumenep
Tahun 2010-2013**

Tahun	Persen (%)
2010	99,95 %
2011	100,84 %
2012	101,21 %
2013	101,28 %

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, 2010-2013, diolah

Dari tabel di atas perkembangan kinerja pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektifitas mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2010 menunjukkan kinerja pemerintah termasuk katagori tidak efektif, karena realisasi pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2013 kinerja pemerintah meningkat dan berada pada katagori efektif yaitu sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101,28 %. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Sumenep berhasil memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Untuk mencapai efektifitas, pemerintah daerah melakukan kebijakan yaitu melakukan pengembangan pada setiap Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) yang telah ditentukan lokasi pusat pengembangan dan arah kegiatan utama yang perlu dikembangkan, misalkan pada SSWP VII yang terdiri dari Kec. Sapeken, Kangayan dan Arjasa yang berpusat di Arjasa. Prioritas kegiatannya diarahkan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan, karena wilayah ini kaya akan hasil alam yaitu minyak dan gas bumi yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD Kabupaten Sumenep.

SIMPULAN

Berdasarkan metode *value for money* kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88, 2 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.

SARAN

Hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode 2010 hingga 2013 yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah ditinjau dari teknik pengukuran *value for money* harus diperbaiki lagi. Pemerintah daerah harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya, agar tercipta *good govermant* dan sukses dalam membangun daerahnya secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintah daerah

harus lebih memperhatikan perencanaan dan pengendalian dalam mengatur anggarannya untuk pembangunan kota Sumenep dan kepulauan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi yang tepat agar tercapai tujuan pembangunan dan pengembangan daerah Kabupaten Sumenep. Dan pemerintah daerah juga bisa menciptakan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja pemerintahan, misalnya mekanisme sumber daya manusia untuk memberikan motivasi kepada staf-stafnya agar memperbaiki kinerja personal maupun pada organisasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Sri. 2010. *Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor di Indonesia*. BPFE: Yogyakarta.
- Ellitan, L. 2001. "Strategi Mendongkrak Kualitas Pelayanan". *Jurnal Ekonomi STEI*, No.15/Th.X/Januari-Maret.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Universitas Jember.
- Mardiasmo, Prof. DR. Mba, AK. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Purnama, I Desak made Ita, Dkk. 2014. *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2007-2011*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Widiana, Hestina Hari.2005. *Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard*. Universitas Brawijaya Malang.

Yuanda, Angel. 2007. *Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Blitar)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

<http://www.djpk.depkeu.go.id>

<http://www.sumenep.go.id>.